

# **RENCANA KERJA RENJA TAHUN 2024**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU**

## **RENCANA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2024**

### **I. LATAR BELAKANG**

Peraturan Presiden No.79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, menjadi Pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023.

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang memuat langkah-langkah untuk tercapainya visi Indonesia tahun 2024 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Pernyataan visi tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Upaya-upaya mendukung lingkup tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu dalam penyelenggaraan sebagian tugas pemerintah di bidang urusan penyelenggaraan pemilihan umum dan pencapaian visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun 2020-2024.

Untuk menjaga kesinambungan Program Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dengan kerangka pembangunan jangka menengah dan mencermati keberhasilan tahun 2023, perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2024, mempertimbangkan permasalahan dan tantangan tahun 2023.

Renja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun 2024 diarahkan untuk melaksanakan penugasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu pada 3 (tiga) sasaran strategis KPU yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
  - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
  - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;

- e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
  - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
  - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraan Pemilu;
  - d. Opini BPK dan LHP;
  - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
  - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Dalam penyusunannya, Renja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 mempertimbangkan pula permasalahan dan tantangan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum pula permasalahan dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu dalam bidang penyelenggaraan pemilihan umum.

Berangkat dari hal di atas, disusun renja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran tahun 2024 lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu.

## **II. KONDISI UMUM**

Gambaran kondisi umum pada awal pelaksanaan Renja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun 2024 diuraikan permasalahan dan tantangan pokok kedepan, serta langkah tindak lanjutnya kedepan yang diperlukan terutama pada tahun 2024.

### **A. MASALAH DAN TANTANGAN POKOK KEDEPAN**

Penyelenggaraan Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Adapun dalam proses pelaksanaannya menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan yaitu :

1. Organisasi dan personil Kesekretariatan belum sepenuhnya dapat menunjang kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum,
2. Desentralisasi pengadaan barang dan jasa/logistik kebutuhan pemilihan umum hanya sampai Komisi pemilihan umum Provinsi,
3. Adanya pemilih yang belum terdaftar sehingga daftar dan data jumlah pemilih tidak akurat dan berubah-ubah,
4. Pelaksanaan sosialisasi setiap tahapan dari segi kualitas dan kuantitas masih terbatas.

## B. TANTANGAN

1. Kedewasaan berdemokrasi dan politik masyarakat, partai politik dan elit masih perlu ditingkatkan karena belum dapat menerima setiap perbedaan pendapat.
2. Kendala waktu dalam persiapan dan pelaksanaan pemilihan terutama dalam pelaksanaan penganggaran, pendataan pemilih berkelanjutan untuk menghadapi Pemilu dan Pemilihan.
3. Kesiapan tahapan dan jadwal pelaksanaan tahapan Pemilu maupun Pemilihan yang akan dilakukan secara bersamaan.

Permasalahan dan tantangan ini perlu ditindaklanjuti melalui langkah-langkah strategis. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan yaitu :

1. Megoptimalkan sosialisasi peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat dan sektor terkait yang terlibat didalam proses penyelenggaraan pemilihan umum.
2. Meningkatkan peran dan fungsi kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum yang professional melalui penataan organisasi dan personil termasuk pengadaan PNS untuk mengantisipasi terjadinya perubahan sistim Pemilu dan Pemilihan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai konsekuensi lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
4. Meningkatkan kemampuan administratif dan peran serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum kabupaten/Kota dalam pengadaan barang dan jasa/logistik kebutuhan pemilihan umum.
5. Meningkatkan kemampuan petugas pelaksana pemilihan umum ditingkat desa/kelurahan, kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam proses perhitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.
6. Meningkatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.
7. Melakukan pemutakhiran daftar dan data pemilih secara cermat dan berkelanjutan,
8. Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.
9. Memverifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil 2019.
10. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris dan arsip-arsip Pemilu/Pemilihan.
11. Melengkapi pendokumentasian setiap tahapan Pemilu/Pemilihan.
12. Memonitor, mengevaluasi dan melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu/Pemilihan.
13. Menyusun peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Pemilu dan Pemilihan.
14. Pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
15. Menyusun laporan pertanggungjawaban.

### III. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2024

Sesuai dengan Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum akan menggunakan 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Eselon I bertanggungjawab atas keberhasilan 2 (dua) program sedangkan setiap eselon II akan bertanggungjawab terhadap 1 (satu) atau 2 (dua) kegiatan. Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

#### A. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : Perencanaan program, tersusunnya peraturan penyelenggaraan pemilu dan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketetapan waktu perencanaan penganggaran harmonisasi dan penyusunan keputusan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi sesuai SOP; serta persentase pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran
2. Menyiapkan dukungan anggaran Badan Adhoc.
3. Menyiapkan dukungan pelaksanaan masa kampanye Pemilu.
4. Memfasilitasi pengelolaan, pengadaan Logistik Pemilu.
5. Menyiapkan dukungan Pemungutan dan Penghitungan Suara
6. Menyiapkan dukungan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
7. Memfasilitasi Penetapan Hasil Pemilu

#### B. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pendukung kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksanya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan Setjen KPU. Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil di Provinsi, Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian. Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen dan inventarisasi pengelolaan dan Barang Milik Negara;
2. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari;
3. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian;

4. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Setjen KPU;
5. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.
6. Menyelenggarakan dukungan pelayanan data dan informasi yang akurat.

#### **IV. STRUKTUR ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN, SUMBER DAYA MANUSIA DAN KETATALAKSANAAN**

Guna mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang professional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah setingkat Eselon IIIa. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan pemilihan umum, system perwakilan, serta memiliki kemampuan kepemimpinan. Ketalaksanaan atau proses bisnis (*business process*) atau manajemen mengatur hubungan kerja antar bagian (sub-sub) dalam organisasi dan mengelola aktivitas dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran ketalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktivitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.

#### **V. PENUTUP**

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum yang telah disusun ini merupakan langkah awal pelaksanaan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum. Dengan rencana kerja ini diharapkan Komisi Pemilihan Umum dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban secara berkelanjutan. Rencana kerja ini juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kesekretariatan maupun masing-masing Sub Bagian, serta secara hirarkis dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum.

Demikian pula diharapkan dapat menambah komitmen bersama dalam rangka memotivasi seluruh pegawai untuk maju bersama dan berhasil mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Rencana kerja ini dapat direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dituangkan dalam dokumen ini, dengan mengacu pada misi dan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024. Penjabaran mengenai kinerja yang lebih lengkap target kinerja beserta pendanaan yang dibutuhkan untuk tahun mendatang dapat dilihat pada Matriks Kinerja dan Matriks Pendanaan.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN INDRAMAYU**

**SEKRETARIS,**



**Arif Hidayat**

NIP. 19660314 199303 1 015

# RENCANA KERJA KPU KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/KOMPONEN	TUJUAN/SASARAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	KOMPONEN PEMBIAYAAN		USULAN LANJUTAN / BARU
1	2	3	4	5	6		7
076.01.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI					119.870.690.000	
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu					838.566.000	
6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu				Belanja Bahan		
111	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu				Belanja Honor Output Kegiatan		
A	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Tujuan : Terlaksananya perencaan dan penyusunan anggaran Pemilu Sasaran : Tersedianya Dokumentasi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pemilu	Rapat, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	Terlaksananya Dukungan Kegiatan Perencanaan, Adhoc, Mutarlih, Sosialisasi, Bimtek dan Regulasi	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas	462.670.000	
6709.QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan				Belanja Bahan		
111	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan				Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	86.269.000	
A	Pelatihan Teknis Kepemiluan	Tujuan : Terlaksananya Pelatihan Teknis Kepemiluan Sasaran : Pegawai KPU	Tes CAT, Class Meeting	Terlaksananya Dukungan Kegiatan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Belanja Perjalanan Dinas		
6709.QGE.004	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan				Belanja Jasa Lainnya		
111	Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan				Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	214.748.000	
A	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	Tujuan : Terlaksananya Sosialisasi / Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan Sasaran : Masyarakat	Sosialisasi, Penyuluham, Bimbingan Teknis	Terlaksananya Dukungan Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		
6709.RAN.001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu						
051	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu						
A	Rapat, Identifikasi IT, Koordinasi Lintas Sektor, ATK	Tujuan : Terlaksananya identifikasi IT, Koordinasi dan ATK Sasaran : Tersedianya Dokumentasi Identifikasi IT, Kordinasi lintas Sektor	Identifikasi, Koordinasi dengan pihak terkait, ATK	Terlaksananya Dukungan Kegiatan persiapan kebutuhan sarana IT Pemilu	Belanja Bahan	9.511.000	
6709.RAN.002	Pengelolaan Sarana IT Pemilu						
052	Pengelolaan Sarana IT KPU						
A	Layanan IT, Jaringan Infrasturktur, Pemeliharaan IT	Tujuan : Penyerelasan Sumber Daya IT yang dimil Sasaran : Sumber Daya IT yang handal	Rapat, koordinasi dengan pihak terkait	Terlayani pengadaan sumber daya IT	Belanja Bahan Belanja Perjalanan Dinas	65.368.000	



KODE	PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/KOMPONEN	TUJUAN/SASARAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	KOMPONEN PEMBIAYAAN		USULAN LANJUTAN / BARU
6867	Pembentukan Badan Ad Hoc					92.440.284.000	
6867.QGE.002	Honorarium Badan Ad Hoc						
051	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Ad Hoc				Belanja Bahan		
A	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Ad Hoc	Tujuan : Melaksanakan Pembayaran Honorarium Badan Ad Hoc, rapat, dukungan Sasaran : Tersedianya Dokumentasi Pembayaran Honorarium Badan Ad Hoc, rapat, dukungan operasional	Melakukan Pembayaran Honorarium Badan Ad Hoc, rapat, dukungan operasional	Terlaksananya Pembayaran Honorarium Badan Ad Hoc, rapat, dukungan operasional	Belanja Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya	92.440.284.000	
6870	Masa Kampanye Pemilu					2.284.499.000	
6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu						
051	Pengelolaan Kampanye Pemilu				Belanja Bahan		
A	Pengelolaan Kampanye Pemilu	Tujuan : Melaksanakan Pengelolaan Kampanye Pemilu Sasaran : Tersedianya Dokumentasi Pengelolaan Kampanye Pemilu	Melakukan Pengelolaan Kampanye Pemilu	Terlaksananya Pengelolaan Kampanye Pemilu	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.284.499.000	
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik					10.958.000.000	
6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu						
051	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu				Belanja Bahan		
A	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Tujuan : Melaksanakan Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu Sasaran : Tersedianya Dokumentasi Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Melakukan Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Terlaksananya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.789.000	
6871.QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Belanja Bahan		
051	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Belanja Honor Output Kegiatan		
A	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tujuan : Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sasaran : Tersedianya Dokumentasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Melakukan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas	10.933.644.000	
6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumen Logistik						
051	Pengelolaan Dokumen Logistik						
A	Pengelolaan Dokumen Logistik	Tujuan : Melaksanakan Pengelolaan Dokumen Logistik Sasaran : Tersedianya Dokumentasi Pengelolaan Dokumen Logistik	Melakukan Pengelolaan Dokumen Logistik	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Logistik	Belanja Bahan	10.567.000	
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara					13.311.559.000	
6872.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara						

KODE	PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/KOMPONEN	TUJUAN/SASARAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	KOMPONEN PEMBIAYAAN		USULAN LANJUTAN / BARU
051 A	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Tujuan : Melaksanakan Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Sasaran : Tersedianya Dokumentasi Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Melakukan Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terlaksananya Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Belanja Honor Output Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas	22.628.000	
6872.QGE.002 051 A	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Tujuan : Melaksanakan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Sasaran : Tersedianya Dokumentasi Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Melakukan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terlaksananya Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.281.420.000	
6872.QGE.003 051 A	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Tujuan : Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Sasaran : Tersedianya Dokumentasi Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Belanja Bahan	7.511.000	
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota					10.104.000	
6981.QGE.001 051 A	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	Tujuan : Melaksanakan Fasilitasi Penyiapan Tahapan Sumpah Janji Sasaran : Tersedianya Dokumentasi Fasilitasi Penyiapan Tahapan Sumpah Janji	Melakukan Fasilitasi Penyiapan Tahapan Penetapan Sumpah Janji	Terlaksananya Fasilitasi Penyiapan Tahapan Sumpah Janji	Belanja Bahan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.112.000	
6981.QGE.002 051 A	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	Tujuan : Melaksanakan Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji Sasaran : Tersedianya Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	Melakukan Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.992.000	
6892	Penetapan Hasil Pemilu					27.678.000	
6892.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu						

KODE	PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/KOMPONEN	TUJUAN/SASARAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	KOMPONEN PEMBIAYAAN		USULAN LANJUTAN / BARU
051	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu						
A	Persiapan Logistik dan Penetapan Hasil Pemilu	Tujuan : Melaksanakan Fasilitas Penyiapan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu  Sasaran : Tersedianya Dokumentasi Fasilitas Penyiapan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	Melakukan Fasilitas Penyiapan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	Terlaksananya Fasilitas Penyiapan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	Belanja Bahan  Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.655.000	
6892.QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu						
051	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu				Belanja Bahan		
A	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	Tujuan : Melaksanakan Pelaksanaan Tahapan Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu  Sasaran : Tersedianya Dokumentasi Pelaksanaan Tahapan Penyelesaian Sengketa penetapan Hasil Pemilu	Melakukan Pelaksanaan Tahapan Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	Terlaksananya Pelaksanaan Tahapan Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil	Belanja Barang Non Operasional Lainnya  Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23.023.000	
076.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					2.648.731.000	
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara					2.369.329.000	
3355.EAA.994	Layanan Perkantoran						
A	Gaji dan Tunjangan	Tujuan : Untuk mewujudkan administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel  Sasaran : Terbayarnya pembayaran Gaji, Honor dan Tunjangan Pegawai	Pembayaran gaji dan tunjangan selama satu tahun	Terbayarnya gaji dan tunjangan	Belanja Gaji Pokok PNS  Belanja Pembulatan Gaji PNS  Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS  Belanja Tunjangan Anak PNS  Belanja Struktural PNS  Belanja Tunjangan Fungsional PNS  Belanja Tunjangan PPh PNS  Belanja Tunjangan Beras PNS  Belanja Uang Makan PNS  Belanja Tunjangan Umum PNS  Belanja Pegawai (TUKIN)	510.672.000  11.000  42.477.000  15.282.000  57.934.000  1.000  20.918.000  38.031.000  132.370.000  15.500.000  690.789.000	
B	Uang Kehormatan				Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845.344.000	
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana					279.402.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/KOMPONEN	TUJUAN/SASARAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	KOMPONEN PEMBIAYAAN		USULAN LANJUTAN / BARU
3360.EBA.994	Layanan Perkantoran						
<b>A</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	Tujuan : Terlaksanyanya Keperluan kantor, Langganan Daya dan Jasa  Sasaran : Tersedianya keperluan kantor, Daya dan Jasa	Pembayaran keperluan kantor, langganan telpon/internet, listrik, air, Pengiriman surat dinas, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan dan mesin	Tersedianya Keperluan kantor, Daya dan Jasa	Belanja Honor Operasional Satker Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Perjalanan Dinas Biasa	166.440.000 18.172.000 12.000.000 11.760.000 2.400.000 51.350.000 3.600.000 13.680.000	
<b>JUMLAH</b>						<b>122.519.421.000</b>	

Indramayu, 5 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU



Arif Hidayat  
NIP. 19660313 199303 1 015